

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Safri, 2021, *Judicial Activism, Judicial Activism memberi keleluasaan hakim Menyusun putusannya (judge making law) berdasarkan pandangan-pandangan personalnya*, Budi Utama, Depok.
- M. Mahrus Ali dkk, 2011, *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*, Pusat penelitian dan pengkajian kepaniteran dan secretariat jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fadjar, Mukhtie, *Pemili, perselisihan hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang.
- Gaffar, M. Jenedjri, 2013, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Isharyanto, 2016, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Penerbit WR, Yogyakarta.
- Mamudji, Sri dan Soekanto Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Minan, Ahsanul, 2019, *Serial evaluasi penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 perihal penegakan hukum Pemilu*. Bawaslu RI, Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2021, *Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism dan Judicial Restraint*. Rajawali Press, Depok.
- Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta.

- Morissan, 2005, *Hukum Tata Negara Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universty Press, Mataram.
- Huda, Ni'matul 2014, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 2014 di Mahkamah Konstitusi, Proshiding Seminar dan Lokakarya Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Indonesia*, PSHK FH UII, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Perludem, Tim Peneliti, 2006, *Efektifitas Panwas: Evaluasi pengawasan Pemilu 2004*, Perludem, Jakarta.
- Santoso, Topo, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1993, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siregar, Fird Edward, 2020, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Suswantoro, Gunawan, *Pengawasan Pemilu partisipatif: Gerakan masyarakat sipil untuk demokrasi Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Soedarsono, 2020, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kenapiteraan MK, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Thayer, B. James, 1893, *The Orgin and Scope of The American Doctrine of*

*Constitutional Law*. Brown and Company, Boston.

Widodo, Heru, 2015, *Hukum Acara Perselisihan hasil Pilkada serentak di Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijayanto, Bambang, *Kajian Putusan MK tentang Pemilu & Pemilukada*, Kemitraan, Jakarta.

#### **B. Jurnal, Makalah, Proseding**

Aditia Arief Firmanto, 2022, “Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan masa depan Demokrasi Lokal di Indonesia”, *Empati Kadarkum*, Vol. 1, No.1, Maret.

Ali, M. Mahrus dkk, 2012, “Tafsir Konstitusional Pemilukada yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1.

Ansori, Mhd, 2019, “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia, *Wajah Hukum*, Vol.3, No.1, April.

Dewi, Nanda Sagita dan Masrur, Devica Rully, 2020, “Kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) di Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap muslim Etnis Uighur, *Crimes Againnst Humanity*, Vol. 1, No. 2,

Rizanizarli, Din, M. dan A, Jalil. 2019, “Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan”. *De Jure*, Vol. 20, No. 3.

Faiz, Pan Mohamad, 2019, “Mantra Terstruktur, Sistematis dan Masif”. *Ruang Konstitusi di Makalah Konstitusi*, No. 147, Mei.

Ilham Kurniawan Ardi, 2022, “Desain Peradilan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Al-Imarah*, Vol. 7, No. 2.

Kasim, Aminuddin, 2021, “Dekonstruksi penanganan pelanggaran administrasi

yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pilkada”, Vol. 33, No. 2.

Kosmas, Ebu dan Mauritsius, Darius. 2009, “Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2009”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 1,

Nugraha, Harry Setya, 2015, “Redesain kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius quia Iustum*, Vol. 22, No. 3, Juli.

Winata, Muhammad Reza, “Judicial Restraint dan Constitutional Interpretation terhadap kompetensi mengadili pelanggaran pemilihan umum terstruktur, sistematis dan massif”, Vol. 17, No. 4 (t.t).

Zuhro, R. Siti, 2019, “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No. 1.

### **C. Internet**

Siegal, Stephen A, 2004, “The Conscientious Congressman’s Guede to The Electoral Count Act of 187, Florida Law Review, Juli.

Lihat di, [www.ssrn.com/abstract=1265227](http://www.ssrn.com/abstract=1265227), diunduh pada Selasa 26 Juli 2022, pukul 13.51 Wib.

Haberle, Peter, 2022, “Role and Impact of Constitutional Court in a Comparative Perspective, Lihat di, [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com), diunduh pada Selasa, 26 Juli 2022, pukul 12.15 Wib.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011  
*jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan *jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara  
Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil  
Presiden.

#### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XXI/2014 Tentang  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik  
Indonesia Tahun 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik  
Indonesia Tahun 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan  
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi  
Jawa Timur Tahun 2008.

## **F. Wawancara Narasumber**

Wawancara Dengan Akademisi PSHK FH UII sekaligus Dosen Departemen HTN

UII Allan Fatchan Gani Wardhana, Tanggal 12 Juni 2024, Secara Zoom Meeting.

Wawancara Dengan Lawyer yang sering beracara di MK sekaligus Managing partners di VST and Partners Law Firm Viktor Santoso Tandiasa, Tanggal 11 Juni 2024, Secara Zoom Meeting.